PERSETUJUAN TINDAKAN MEDIS (*Informed Consent*) DAN PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PASIEN DAN DOKTER

Fransiska Novita Eleanora
Fakultas Hukum Universitas MPU Tantular

ABSTRACT

An informed consent can be defined as an equipment of evidence given by medical doctor to patient and or his/her family to get the approval for surgery to his/herself as along as the risk will be happened. The purpose of this paper is to discuss that informed consent serve which could be used as a law protection to the medical doctor and patient. If there is a negligence done by medical doctor to the patient, therefore they can not be by patient due has previously agreed. The method used bibliography study. It can be concluded that an informed consent is valuable information which can give description as a means of protection evidence of law for medical doctor and patient in justice.

PENDAHULUAN

Sehat merupakan suatu keadaan yang didambakan oleh setiap orang. Hingga batas-batas tertentu, tiap orang kecuali anak-anak, mampu menjaga kesehatannya sendiri. Mereka akan hidup dengan teratur, mengkonsumsi makanan bergizi, berolah raga secukupnya, dan sebagainya. Bagaimanapun, kesehatan merupakan kebutuhan pokok dalam kehidupan, sedangkan pengetahuan dan ketrampilan pasien terbatas. Dengan demikian, pasien maupun keluarganya akan mencari pertolongan kepada petugas kesehatan. (Husein Korbala:1993 ; 5)

Salah satu tujuan dari hukum adalah untuk melindungi kepentingan pasien di samping mengembangkan kualitas profesi dokter atau tenaga kesehatan. Keserasian antara kepentingan pasien dan kepentingan tenaga kesehatan, merupakan salah satu penunjang keberhasilan pembangunan sistem kesehatan. Oleh karena itu perlindungan hukum terhadap kepentingan-kepentingan itu harus diutamakan. Di satu pihak pasien menaruh kepercayaan terhadap kemampuan profesional tenaga kesehatan. Di lain pihak karena adanya kepercayaan tersebut seyogyanya tenaga kesehatan memberikan pelayanan kesehatan menurut standar profesi dan berpegang teguh pada kerahasiaan profesi. Dengan semakin berkembangnya masyarakat, hubungan tersebut secara perlahan-lahan mengalami perubahan. Kepercayaan kepada dokter secara pribadi berubah

menjadi kepercayaan terhadap kemampuan ilmu kedokteran dan teknologi. Pengetahuan tentang hak dan kewajiban pasien diharapkan akan meningkatkan kualitas sikap dan tindakan yang cermat dan hati-hati dari tenaga kedokteran. Perubahan yang disebabkan adanya perkembangan terhadap peningkatan akan pengetahuan dan kesadaran masyarakat terhadap tanggung jawab atas kesehatannya sendiri, kepercayaan yang tertuju pada kemampuan dokter secara pribadi, sekarang bergeser ke arah kemampuan ilmu.

Tujuan penulisan makalah ini adalah untuk mengetahui: Bagaimanakah perlindungan hukum terhadap dokter dan pasien berkaitan dengan *Informed consent*.

PEMBAHASAN

Informed Consent

Informed Consent terdiri dari dua kata yaitu *informed* yang berarti telah mendapat penjelasan atau keterangan (informasi), dan *consent* yang berarti persetujuan atau memberi izin. Jadi *informed consent* mengandung pengertian suatu persetujuan yang diberikan setelah mendapat informasi. (Kartono Muhammad:1991;20). Dengan demikian *informed consent* adalah persetujuan yang diberikan oleh pasien dan atau keluarganya atas dasar penjelasan mengenai tindakan medis yang akan dilakukan terhadap dirinya serta risiko yang berkaitan dengannya.

Di Indonesia terdapat ketentuan *informed consent* yang bertujuan tidak hanya untuk melindungi pasien dari kesewenangan dokter, tetapi juga diperlukan untuk melindungi dokter dari kesewenangan pasien yang melanggar batas-batas hukum dan perundang-undangan (malpraktek). (Soerjono Soekanto:1987;45) Hal ini tidak berarti para dokter dan tenaga kesehatan di Indonesia tidak mengenal dan melaksanakan *informed consent* karena jauh sebelum itu telah ada kebiasaan pada pelaksanaan operatif, dokter selalu meminta persetujuan tertulis dari pihak pasien atau keluarganya sebelum tindakan operasi itu dilakukan.

Dasar Hukum *Informed Consent*

Secara yuridis doktrin *informed consent* telah diterima dan bersatu di Indonesia sejak tahun 1981, sebagaimana termuat dalam peraturan pemerintah No 18 tahun 1981 tentang Bedah Mayat Klinis dan Bedah Mayat Anatomis serta Transplantasi Alat dan atau Jaringan tubuh manusia. Dalam Bab VII, Pasal 15 ayat (1) PP No. 18 Tahun 1981 dinyatakan bahwa: "Sebelum persetujuan tentang transplantasi alat dan atau jaringan tubuh manusia diberikan oleh calon donor hidup, calon donor yang bersangkutan terlebih dahulu diberitahu oleh dokter yang merawatnya, termasuk dokter konsultan mengenai sifat operasi, akibat-akibatnya dan kemungkinan-kemungkinan yang akan terjadi". (Veronika Komalawati : 2002;18)

Selanjutnya dalam Pasal 15 ayat (2) disebutkan pula: bahwa: "Dokter sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus yakin benar bahwa calon donor yang bersangkutan telah menyadari sepenuhnya arti dari pemberitahuan tersebut." Pelanggaran terhadap ketentuan tersebut sebagaimana disebutkan dalam BAB IX pasal 20 ayat (1), diancam pidana kurungan selamalamanya 3 (tiga) bulan atau denda setinggi-tingginya 7.500 (tujuh ribu lima ratus rupiah). Di samping ancaman pidana tersebut menurut pasal 20 ayat (2) dapat diambil tindakan administratif. *Informed consent* sebagaimana diatur dalam PP No. 18 Tahun 1981 tersebut selain bersifat khusus yaitu hanya untuk tindakan transplatansi yang tidak memuat persyaratan lain untuk sahnya perjanjian misalnya batas umur pemberi persetujuan. Barangkali karena menyadari kekurangan tersebut serta menghambatnya pembicaraan di tengah-tengah masyarakat tentang berbagai kasus yang terjadi (kasus

muhidin, kasus Andrian, dll) yang cukup menguncangkan dunia kedokteran. Sehingga pada tahun 1989 Menteri Kesehatan Republik Indonesia mengeluarkan Peraturan Nomor 585/MenKes/Per/IX/1989 tanggal 4 September 1989 tentang Persyaratan Tindakan Medik. Peraturan Menteri ini mengatur secara agak detil tentang bentuk dan syarat *informed consent* termasuk siapa yang bertanggung jawab atas pelaksanaannya. Di samping itu adanya, surat keputusan PB IDI No 319/PB/A4/88. Pernyataan IDI (Ikatan Dokter Indonesia), tentang *informed consent* tersebut adalah:

1. Manusia dewasa sehat jasmani dan rohani berhak sepenuhnya menentukan apa yang hendak dilakukan terhadap tubuhnya. Dokter tidak berhak melakukan tindakan medis yang bertentangan dengan kemauan pasien, walaupun untuk kepentingan pasien sendiri.
2. Semua tindakan medis (diagnostik, terapeutik maupun paliatif) memerlukan *informed consent* secara lisan maupun tertulis.
3. Setiap tindakan medis yang mempunyai risiko cukup besar, mengharuskan adanya persetujuan tertulis yang ditandatangani pasien, setelah sebelumnya pasien memperoleh informasi tentang perlunya tindakan medis yang bersangkutan serta risikonya.
4. Untuk tindakan yang tidak termasuk dalam butir 3, hanya dibutuhkan persetujuan lisan atau sikap diam.
5. Informasi tentang tindakan medis harus diberikan kepada pasien, baik diminta maupun tidak diminta oleh pasien. Menahan informasi tidak boleh, kecuali bila dokter menilai bahwa informasi tersebut dapat merugikan kepentingan kesehatan pasien.
6. Isi informasi mencakup keuntungan dan kerugian tindakan medis yang direncanakan, baik diagnostik, terapeutik maupun paliatif. Informasi biasanya diberikan secara lisan, tetapi dapat pula secara tertulis.

Hubungan Hukum Dokter dan Pasien

Hubungan dokter-pasien sudah ada sejak zaman nenek moyang kita. Saat itu yang disebut dokter adalah orang yang memiliki kemampuan untuk menyembuhkan penyakit. Sumpah Hipokrates merupakan salah satu bentuk hukum yang mengatur hubungan dokter-pasien. Dalam sumpah hipokrates, dokter diingatkan untuk berperilaku baik sesuai dengan norma yang berlaku

dalam masyarakat. (Wila Candrawila:2001;37)

Hukum lainnya adalah kitab undang-undang Hammurabi dimana dalam kitab tersebut seorang dokter harus bertanggung jawab terhadap kerugian pasien yang diakibatkan oleh tindakannya. Kalau dilihat dari kaca mata hukum, hubungan antara pasien dengan dokter termasuk dalam ruang lingkup perjanjian (transaksi terapeutik) atau masuk dalam wilayah hukum perdata. Karena adanya kesanggupan dari dokter untuk mengupayakan kesehatan atau kesembuhan pasien, sebaliknya pasien menyetujui tindakan terapeutik yang dilakukan oleh dokter tersebut. (SR. Sianturi : 1996;12)

Perjanjian terapeutik memiliki sifat dan ciri yang khusus, tidak sama dengan sifat dan ciri perjanjian pada umumnya, karena obyek perjanjian dalam transaksi terapeutik bukan **kesembuhan** pasien, melainkan mencari **upaya** yang tepat untuk kesembuhan pasien. Perjanjian dokter dengan pasien termasuk pada perjanjian tentang **upaya** bukan perjanjian tentang **hasil**. (www.google.com). Pada dasarnya perjanjian terapeutik yang disesuaikan dengan dasar hukum kontraktual yakni pasal 1320 KUHPerdata. Hal ini berarti sebelum tercapainya kesepakatan atau persesuaian pernyataan kehendak diperlukan komunikasi sebagai proses penyampaian informasi timbal balik antara kedua subyek hukum yang bersangkutan.

Hubungan hukum antara pasien dengan dokter dapat terjadi antara lain karena ; pasien sendiri yang mendatangi dokter untuk meminta pertolongan mengobati sakit yang dideritanya, dalam keadaan seperti ini terjadi persetujuan kehendak antara kedua belah pihak, dan terjadi hubungan hukum yang bersumber dari kepercayaan pasien terhadap dokter, sehingga pasien bersedia memberikan persetujuan tindakan medik (*informed consent*).

Dari sudut pandang dokter Persetujuan Tindakan Medik ini berkaitan dengan kewajiban dokter untuk memberikan informasi kepada pasien dan kewajiban untuk melakukan tindakan medik sesuai dengan standar profesi medik. Menurut Syahrul Machmud (2008) bahwa suatu *informed consent* baru sah diberikan oleh pasien jika memenuhi minimal 3 (tiga) unsur sebagai berikut:

1. Keterbukaan informasi yang cukup diberikan oleh dokter.

2. Kompetensi pasien dalam memberikan persetujuan.
3. Kesukarelaan dalam memberikan persetujuan.

Secara umum, bentuk persetujuan yang diberikan pengguna jasa tindakan medis (pasien) kepada pihak pelaksana jasa tindakan medis (dokter) untuk melakukan tindakan medis dapat dibedakan menjadi tiga bentuk, yaitu:

1. **Persetujuan Tertulis**, biasanya diperlukan untuk tindakan medis yang mengandung risiko besar, yaitu setiap tindakan medis yang mengandung risiko cukup besar, mengharuskan adanya persetujuan tertulis, setelah sebelumnya pihak pasien memperoleh informasi akurat tentang perlunya tindakan medis serta risiko yang berkaitan dengannya (telah terjadi *informed consent*);
2. **Persetujuan Lisan**, biasanya diperlukan untuk tindakan medis yang tidak mengandung risiko tinggi, yang diberikan oleh pihak pasien.
3. **Persetujuan dengan isyarat**, dilakukan pasien melalui isyarat, misalnya pasien yang akan disuntik atau diperiksa tekanan darahnya, langsung menyodorkan lengannya sebagai tanda menyetujui tindakan yang akan dilakukan terhadap dirinya.

Selain itu, menurut Veronika Komalawati (2002;32), Persetujuan Tindakan Medik (*Informed Consent*) dapat diklasifikasikan menjadi 2 (dua), yaitu:

1. **Implied Consent**, yaitu persetujuan yang dianggap telah diberikan walaupun tanpa pernyataan resmi, yaitu pada keadaan biasa dan pada keadaan darurat atau emergency. Pada keadaan gawat darurat yang mengancam jiwa pasien, tindakan menyelamatkan kehidupan tidak memerlukan Persetujuan Tindakan Medik;
2. **Expressed Consent**, yaitu Persetujuan Tindakan Medik yang diberikan secara eksplisit, baik secara lisan maupun tertulis

Dalam hubungan hukum antara pelaksana (dokter) dengan pengguna jasa tindakan medis (pasien), maka pelaksanaan *informed consent*, bertujuan untuk

1. **Melindungi pengguna jasa tindakan medis**, secara hukum dari segala tindakan medis yang dilakukan tanpa sepengetahuannya, maupun tindakan pelaksana jasa tindakan medis yang sewenang-wenang, tindakan malpraktek yang bertentangan dengan hak asasi pasien dan standar profesi medis, serta penyalahgunaan alat

canggih yang memerlukan biaya tinggi yang sebenarnya tidak perlu dan tidak ada alasan medisnya;

2. **Memberikan perlindungan hukum** terhadap pelaksana tindakan medis dari tuntutan-tuntutan pihak pasien yang tidak wajar, serta akibat tindakan medis yang tak terduga dan bersifat negatif, yang tak mungkin dihindarkan walaupun dokter telah bertindak hati-hati dan teliti serta sesuai dengan standar profesi medik. Perlunya dimintakan *informed consent* dari pasien karena *informed consent* mempunyai beberapa fungsi sebagai berikut :

1. Penghormatan terhadap harkat dan martabat pasien selaku manusia
2. Promosi terhadap hak untuk menentukan nasibnya sendiri
3. Untuk mendorong dokter melakukan kehati-hatian dalam mengobati pasien
4. Menghindari penipuan dan misleading oleh dokter
5. Mendorong diambil keputusan yang lebih rasional
6. Mendorong keterlibatan publik dalam masalah kedokteran dan kesehatan
7. Sebagai suatu proses edukasi masyarakat dalam bidang kedokteran dan kesehatan.

Perlindungan Hukum Terhadap Dokter Dan Pasien

Dengan diterapkannya pasal 1320 KUHPPerdata, maka pelaksanaan perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik sesuai dengan ketentuan pasal 1338 dan 1339 KUHPPerdata. Dengan adanya ketentuan tersebut, maka proses terhadap kepastian dan perlindungan hukum bagi dokter dan pasien terjadi dengan lahirnya kata sepakat, yang disertai dengan kecakapan untuk bertindak sehingga pelayanan kesehatan dapat terwujud secara baik dan optimal. (Kartono Muhammad:1991;49). Untuk menciptakan perlindungan hukum antara dokter dan pasien maka para pihak harus mengetahui apa yang menjadi hak dan kewajiban pasien dan dokter dalam hal menyimpan rahasia kedokteran, rahasia jabatan dan pekerjaan.

Dalam Pasal 184 KUHP disebutkan bahwa alat bukti yang sah dalam hukum pidana adalah, keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa. Sedangkan dalam pasal 187 KUHP diuraikan secara jelas bahwa surat dibuat atas sumpah jabatan

yang dikuatkan dengan sumpah. Butir C pasal itu menyebutkan yang dimaksud dengan surat antara lain adalah surat keterangan dari seorang ahli yang memuat pendapat berdasarkan keahlian mengenai suatu hal atau suatu keadaan yang diminta secara resmi padanya. (Soerjono Soekanto;1987;62)

Dari penjelasan di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa formulir *informed consent* dapat dijadikan alat bukti yang sah untuk dapat membuktikan bahwa pasien telah bersedia atau setuju untuk tindakan medis, sehingga resiko yang timbul sudah menjadi resiko pasien dan dokter tidak dapat dipersalahkan. Selain sebagai alat bukti surat, *informed consent* juga dapat menjadi alat bukti petunjuk, hal tersebut diatur dalam pasal 186 KUHP ayat (2) yang menyebutkan bahwa petunjuk dapat diperoleh dari keterangan surat dan keterangan terdakwa, hal ini berarti *informed consent* dapat dijadikan sebagai alat bukti untuk menunjukkan bahwa pasien telah setuju dengan informasi yang sudah diberikan kepadanya, sehingga dokter tidak dapat dipersalahkan.

Dengan ditanda tangannya *Informed consent* maka pasien atau keluarganya dianggap telah menyetujui resiko dari tindakan medik yang dilakukan oleh dokter berdasarkan informasi yang diberikan oleh dokter itu sendiri, sehingga dokter dituntut untuk memberikan informasi yang jelas dan akurat, serta informasi yang dapat dipahami keluarganya, termasuk resiko yang dihadapi.

Berdasarkan uraian di atas, maka *informed consent* dapat dijadikan dasar pembelaan serta perlindungan hukum bagi dokter. *Informed Consent* adalah bentuk persetujuan pasien atas tindakan dokter terhadap dirinya, namun untuk lebih melindungi dokter terhadap tuntutan pelanggaran *informed consent*, maka persetujuan tersebut hendaknya dapat dibuat dalam bentuk tertulis yang ditandatangani oleh yang berhak memberikan persetujuan, karena *informed consent* dapat digunakan sebagai alat bukti sah dalam pengadilan yang berbentuk surat atau petunjuk. Sedangkan perlindungan hukum bagi pasien, jika terbukti dokter dianggap dalam memberikan informasi yang tidak benar kepada pasien, menyangkut penyakit pasien, maka dokter tersebut dituntut karena dianggap memberikan suatu informasi, yang tidak benar. (www.google.com)

Informed consent harus diterapkan oleh dokter kepada pasien sebagai bentuk penghormatan terhadap hak-hak pasien. Hak-hak tersebut memuat kaidah-kaidah yang harus dijamin oleh hukum agar tidak menyebabkan kerugian bagi diri pasien.

Pelanggaran terhadap *informed consent* dapat disebabkan karena adanya pelanggaran hak pasien atas informasi, sudah menjadi hak pasien untuk mengetahui segala hal yang berhubungan dengan penyakitnya, karena pasien harus mendapat informasi atas setiap tindakan medik yang dilakukan terhadapnya, serta segala resiko yang mungkin timbul akibat tindakan medik itu.

Perlindungan hukum yang diberikan kepada pasien berkaitan dengan *informed consent* maka dokter tersebut dapat dituntut secara perdata dan pidana, apalagi jika dari hal tersebut sampai menyebabkan terjadinya malpraktek medik, sehingga pasien tersebut sangat dirugikan secara jasmani dan rohani. (Husein Korbala:1993:29)

Dasar Hukum dan Perlindungan Hak-hak Pasien

1. DUHAM (Deklarasi Umum Hak Asasi Manusia):hak memperoleh keamanan, hak memilih, hak mendapat informasi, hak untuk didengar, hak perlindungan kesehatan dan keamanan, hak perlindungan kepentingan ekonomi, hak mendapat ganti rugi, hak atas menerangan, hak untuk didengar.

2. UUD 1945 yakni didalam pasal 27 ayat (2) mengenai hak-hak warga negara dan dan pasal 28 mengenai hak kemerdekaan berkumpul, berserikat, mengeluarkan pendapat secara lisan maupun tertulis.

3. Tap MPR No. II/MPR/1978 menegaskan bahwa setiap manusia mempunyai hak dan kewajiban azasi yang sama, agar dipenuhi setiap hak dan kewajiban dipenuhi oleh masing-masing orang.

Aspek Hukum Perdata, suatu tindakan medis yang dilakukan oleh pelaksana jasa tindakan medis (dokter) tanpa adanya persetujuan dari pihak pengguna jasa tindakan medis (pasien), sedangkan pasien dalam keadaan sadar penuh dan mampu memberikan persetujuan, maka dokter sebagai pelaksana tindakan medis dapat dipersalahkan dan digugat telah melakukan suatu perbuatan melawan hukum berdasarkan Pasal 1365 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUH

Perdata). Hal ini karena pasien mempunyai hak atas tubuhnya, sehingga dokter harus menghormatinya; (Wila Candrawila:2001:64)

Aspek Hukum Pidana, "*informed consent*" mutlak harus dipenuhi dengan adanya pasal 351 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tentang penganiayaan. Suatu tindakan yang dilakukan pelaksana jasa tindakan medis tanpa adanya izin dari pihak pasien, maka pelaksana jasa tindakan medis dapat dituntut telah melakukan tindak pidana penganiayaan yaitu telah melakukan pelanggaran terhadap Pasal 351 KUHP.

Aspek hukum Administrasi, maka secara tegas telah diisyaratkan dengan pasal 13 Permenkes No. 585 tahun 1989, yaitu:

"terhadap dokter yang melakukan tindakan medik tanpa adanya persetujuan dari pasien, atau keluarga dapat dimintakan sanksi administratif berupa pencabutan surat ijin praktek". Sedangkan dari segi **pertanggung jawaban kode etik**, maka penerapan *informed consent*, membuktikan kesungguhannya dalam mematuhi "*primum non nocere*" (yang terutama adalah tidak untuk mencelakakan pasien, serta mengutamakan kepentingan (kebaikan) pasien).

Dalam Pasal 10 KODEKI (**Kode Etik Kedokteran Indonesia**) menyebutkan bahwa dokter senantiasa mengingat akan kewajiban melindungi hidup makhluk insani, di dalam penjelasan pasal 10 alinea kedua terdapat ketentuan "bahwa sebelum operasi dimulai, perlu dibuatkan terlebih dahulu persetujuan tertulis dari penderita atau keluarganya yang masih dalam keadaan penuh sadar." Ketentuan pasal 10 tersebut, dimaksudkan bahwa dokter yang tidak memberikan keterangan dalam suatu tindakan medis tanpa persetujuan pasien atau keluarganya, berarti melanggar kode etik kedokteran yang selama ini dijadikan pedoman bertindak oleh kalangan dokter sendiri.

PENUTUP

Kesimpulan

1. Perlindungan hukum terhadap pasien dapat dilakukan dengan pemberian sanksi pada dokter dalam bentuk sanksi perdata, pidana, administrasi serta dari kode etik itu sendiri. Sedangkan perlindungan hukum terhadap dokter, dapat dilakukan dengan menunjukkan surat bukti

persetujuan tindakan medis (*informed consent*), yang disetujui oleh pasien dan keluarganya.

2. Perlindungan hukum terhadap dokter dan pasien, harus diatur dalam suatu peraturan perundang-undangan, sehingga dapat menjadi pedoman yang jelas bagi aparat penegak hukum dalam memberikan sanksi yang tegas.

Saran-saran

1. Dokter harus memberikan penjelasan yang akurat, dan jelas sampai di mana batas-batas Informasi yang harus diketahui oleh pasien, sehingga tidak menimbulkan efek samping berupa gugatan kepada dokter yang mengobatinya.
2. Pasien dapat mengerti dan memahami, penjelasan dari dokter sehingga dapat terhindar dari hal-hal yang merugikan dirinya.

DAFTAR PUSTAKA

- Husein Kerbala, *Segi-segi Etis Dan Yuridis Informed Consent*, Edisi Kedua, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1993
- Kartono Muhammad, *Informed Consent Dan Permasalahannya Di Indonesia*, Jakarta, 1991
- Soerjono Soekanto, *Kontrak Terapeutik Antara Pasien Dengan Terapi Medis*, Media Hospital, Jakarta, 1987
- S.R. Sianturi, *Asas-asas Hukum Pidana Di Indonesia Dan Penerapannya*, Alumni Ahaem-Petehaem, Jakarta, 1996
- Syahrul Machmud, *Penegakan Hukum Dan Perlindungan Hukum Bagi Dokter Yang Melakukan Malpraktek*, Bandung, 2008
- Veronika Komalawati, *Peranan Informed Consent Dalam Transaksi Terapeutik*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002
- Wila Candrawila, *Hukum Kedokteran*, Mandar Maju, Bandung, 2001
- www.google.com

**DENGAN MEMBERIKAN
PERLINDUNGAN HUKUM YANG
JELAS KEPADA PASIEN, DAPAT
MENGHINDARKAN PASIEN DARI
PERBUATAN “MAL PRAKTEK”
OLEH DOKTER**